



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KUNINGAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KUNINGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 3 Kuningan adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 3 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 3 Kuningan meliputi:
 - a. pembuatan produk panel kontrol otomasi industri;
 - b. jasa servis kendaraan;
 - c. jasa pembuatan multimedia;

- d. jasa pemasangan instalasi listrik;
 - e. jasa service HP dan pemasangan CCTV;
 - f. produk dan jasa desain permodelan dan informasi bangunan;
 - g. prodak teknik konstruksi dan perumahan; dan
 - h. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 3 Kuningan selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 3 Kuningan selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 3 Kuningan.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 3 Kuningan selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

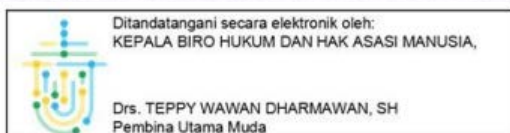
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATAMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 73 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 3 KUNINGAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 3 Kuningan

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Pembuatan Running Text (P10, P5, satu warna dan 4 warna)	1 Set	Dimulai dari Rp800.000,00 sd Rp10.000.000,00	Menyesuaikan Ukuran
2	Pembuatan Panel Kontrol Otomasi Industri (AC 220/ 380 V, Pengaman Sistem, Output menyesuaikan mekanik terkendali)	1 Set	Dimulai Rp7.000.000,00 sd Rp50.000.000,00	Menyesuaikan Kebutuhan Mekanik Terkendali
3	Perawatan Berkala Sepeda Motor			Menyesuaikan dengan Jenis Sepeda Motor
	a. Service Rutin/ Berkala	1 Unit	Rp30.000,00 - 80.000,00	
	b. Service CVT	1 Unit	Rp50.000,00	
	c. Ganti Oli	1 Unit	Rp50.000,00 - Rp150.000,00	
4	Desain Grafis			Disesuaikan dengan kebutuhan/ Keperluan
	a. Pembuatan logo	1 Buah	Rp100.000,00 - 1.000.000,00	
	b. undangan	1 Buah	Rp1.000,00 - 10.000,00	
	c. Desain kaos	1 Buah	Rp50.000,00 - 100.000,00	
	d. Desain spanduk	1 Buah	harga mulai Rp25.000,00	

5	fotografi a. Foto Studio b. Foto kegiatan (pernikahan, sunatan, dl)	1 Set 1 Set	harga mulai Rp25.000,00 Rp500.000,00 - 2.500.000,00	
6	Videografi a. Pembuatan profil b. Dokumentasi kegiatan	1 Set 1 Set	Rp500.000,00 - 1.500.000,00 Rp500.000,00 - 2.500.000,00	
7	Kendaraan Roda Empat a. Jasa Perawatan Berkala 10.000 KM b. Sparepart Perawatan Berkala 10.000KM c. Jasa Perawatan Berkala 20.000 KM d. Sparepart Perawatan Berkala 20.000 KM e. Jasa Perawatan Berkala 40.000 KM f. Sparepart Perawatan Berkala 40.000 KM g. Jasa Perawatan Berkala 80.000 KM h. Sparepart Perawatan Berkala 80.000 KM i. Jasa Sporing Balancing j. Sparepart Sporing Balancing k. Jasa Tune Up l. Sparepart Tune Up	1 Kali 1 Set 1 Kali 1 Set 1 Kali 1 Set 1Kali 1 Set 1 Kali 1 Set 1 Kali 1 Set	Rp400.000,00 - 600.000,00 Rp350.000,00 - 550.000,00 Rp600.000,00 - 800.000,00 Rp550.000,00 - 750.000,00 Rp1.200.000,00 - 1.400.000,00 Rp850.000,00 - 1.250.000,00 Rp2.400.000,00 - 2.800.000,00 Rp2.000.000,00 - 2.600.000,00 Rp200.000,00 - 350.000,00 Rp180.000,00 - 240.000,00 Rp600.000,00 - 850.000,00	Disesuaikan dengan jenis kendaraannya
8	Memasang Instalasi Penerangan rumah sederhana a. Jasa b. Material	1 Unit 1 Unit	Rp1.000.000,00 - 2.000.000,00 Rp2.000.000,00 - 3.000.000,00	Sesuai kondisi dan permintaan pelanggan
9	Memasang Instalasi Tenaga 3 Fasa a. Jasa b. Material	1 Unit 1 Unit	Rp3.000.000,00 - 4.000.000,00 Rp5.000.000,00 - 8.000.000,00	

10	Memasang instalasi tenaga berbasis PLC a. Jasa b. Material	1 Unit 1 Unit	Rp4.000.000,00 - 6.000.000,00 Rp8.000.000,00 - 12.000.000,00	
11	Perbaiki Alat Rumah Tangga Listrik a. Jasa b. Material	1 Unit 1 Unit	Rp100.000,00 - 700.000,00 Rp500.000,00 - 1.000.000,00	
12	Service HP a. Ganti IC charger b. Biaya servis LCD (layar) c. Ganti konektor d. Ganti port headset e. Ganti tombol power f. Ganti konektor baterai g. Lupa pola h. Biaya reset i. Perbaiki bootloop j. Perbaiki HP konslet k. Perbaiki HP mati total l. Biaya servis HP mati kena air m. Flash ulang HP n. Perbaiki IMEI hilang o. Backup data	1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 Kali	Rp100.000,00 - 200.000,00 Rp400.000,00 - 800.000,00 Rp50.000,00 - 150.000,00 Rp50.000,00 - 100.000,00 Rp50.000,00 - 80.000,00 Rp50.000,00 - Rp100.000,00 Rp100.000,00 Rp50.000,00 - 100.000,00 Rp50.000,00 - 150.000,00 Rp400.000,00 - mendekati harga hp baru Rp100.000,00 - 500.000,00 Rp400.000,00 - 1.000.000,00 Rp50.000,00 - 200.000,00 Rp50.000,00 - 150.000,00 Rp75.000,00 - 150.000,00	Disesuaikan dengan jenis HP dan tingkat kerusakan
13	jasa pemasangan CCTV a. Jasa Instalasi, Setting IP CCTV Full HD (Termasuk pemasangan Kamera, Kabel, Bracket, jack Bnc, konektor, Label, testing) >10 titik)	1 Titik	Rp50.000,00 - Rp450.000,00 Per titik (Tergantung tingkat kesulitan)	
14	Perencanaan Bangunan a. Gambar kerja 2 Dimensi dan 3 Dimensi, RAB dengan Analisa Harga Satuan berdasarkan SNI	1 Unit	2 % s.d 4 % dari biaya fisik bangunan	Disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan

15	Pengawasan Pembangunan Bangunan a. Laporan Progres Pelaksanaan mingguan, bulanan dan laporan akhir	1 Unit	2 % s.d 3 % dari biaya fisik bangunan	
16	Pembuatan Maket a. maket arsitektur/gedung	1 Unit	Dihitung berdasarkan bentuk bangunan dan skala	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL